

yang khas. Mereka yang mengalami islamisasi secara intensif menjadikannya dalam komunitas Muslim ortodoks. Sedangkan mereka yang mengalami proses islamisasi dalam intensitas rendah dikategorikan sebagai abangan.

Istilah santri-abangan yang dipopulerkan oleh Geertz ini sebenarnya merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan religiusitas. Akan tetapi usaha memahami variasi pola keagamaan dan kultural antara santri dan abangan setidaknya akan memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada kita tentang Islam sebagaimana dipeluk oleh orang Jawa.

Meskipun istilah yang unik dan khas Jawa ini dipengaruhi sistem klasifikasi ganda dalam Islam, tetapi orang Islam Jawa tidak dapat menerima klasifikasi ganda yang *rigid* dalam bentuk polarisasi yang kontra. Dengan demikian, santri dinilai sebagai orang Islam yang sudah kuat imannya dan amalan-amalan ibadahnya. Sedangkan abangan diasosiasikan sebagai orang yang masih lemah imannya dan belum mengerti kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Walau kerap kali abangan tidak mudah untuk diajak melaksanakan perintah agama seperti salat, puasa dan sebagainya, akan tetapi dalam setiap aktivitas religiusitas, abangan akan menerima, bahkan selalu meminta kepemimpinan golongan santri.

Tampaknya dikhotomi santri versus abangan menjadi serius ketika dibonceng oleh sistem pengelompokan politik. Sejak perkembangannya Islam tidak steril dari anasir politik. Menurut Benda dalam Islam sendiri batasan antara agama dan politik sangat tipis, Islam adalah way of life dan agama. Lebih jauh Benda mengatakan bahwa sejarah Islam Indonesia adalah perluasan peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial dan politik di Indonesia.¹

Penulis melihat, bahwa pertumbuhan yang cepat terhadap kesadaran diri secara politik bangsa Indonesia sebagai dampak dari model pendidikan gaya Barat dan gagasan pembaharuan Islam dari Timur Tengah. Dampak tersebut begitu kentara ketika memasuki abad ke-20, dimana format gerakan Islam mengalami transformasi, dari pola komunal menjadi pola asosiasional dan solidaritas yang bersifat organis. Fenomena ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi sosial politik bercorak modern yang sebelumnya belum pernah ada. Hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya yang sebelumnya paternalistik berubah menjadi lebih apresiatif-rasionalistik. Dalam

¹ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980, hlm. 32-33.

pengambilan keputusanpun lebih mengedepankan asas demokratis dengan menggunakan mekanisme musyawarah.

Produk pendidikan Barat tampaknya lebih banyak mencetak figur-figur nasionalis sekuler. Mereka menyerukan perwujudan kebangsaan Indonesia yang mengatasi ikatan-ikatan keagamaan dan kesukuan. Meskipun banyak dari mereka beragama Islam, namun pada umumnya golongan ini diasosiasikan oleh nilai-nilai Islam sinkretis, yang jika digunakan dikhotomik santri-abangan mereka termasuk kelompok abangan.² Dengan terbentuknya PNI pada tahun 1927 menandai semakin dominannya peran kelompok nasionalis sekuler ini dalam perpolitikan waktu itu. dengan demikian, Islam sebagai ideologi mendapatkan saingan berat yang turut mewarnai perpolitikan bangsa Indonesia dalam membentuk konstitusi bagi negara Indonesia yang merdeka.

Ditilik dari wacana gerakan Islam modern di Indonesia, terjadi suatu lompatan besar dari SDI ke SI, suatu lompatan dari hanya memajukan kesejahteraan dan kualitas hidup anggota belaka, menjadi kesadaran akan perlunya sebuah sistem kekuasaan yang akan menciptakan kesejahteraan yang diinginkan. Ada semacam

²Drs. Abdul Azis Thaba, MA, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 145.

kongkretisasi terhadap cita-cita adanya negara yang dikuasai sendiri dengan nuansa keislaman.

Wawasan kebangsaan SI sejak mula perjuangan kemerdekaan merupakan sumbangan terbesar bagi sejarah modern Indonesia, sedangkan perjuangan pembebasan dari ikatan penjajah sebelumnya, sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai perjuangan kemerdekaan. Perang Aceh maupun perang Diponegoro misalnya, tidak lebih hanya perjuangan pembebasan teritorial tertentu dari kekuasaan penjajah. Dalam kapasitas inilah perjuangan SI merupakan titik mula dari perjuangan kemerdekaan bangsa. Semangat itulah yang senantiasa terdapat dalam perjuangan semua organisasi masyarakat dan partai politik yang muncul dengan bendera Islam sejak itu.

Demikian kontribusi besar SI dalam memulai dan mengarahkan kesadaran berbangsa umat Islam kepada wawasan yang baru. Itulah yang membuat begitu banyak gerakan Islam turut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, berkulminasi pada berdirinya MIAI, kemudian disusul Masyumi.

Ketika dimulai serangkaian perdebatan tentang hakekat apa yang harus dimiliki negara yang dicita-citakan setelah kemerdekaan tercapai, segera muncul kesadaran baru yang dirumuskan sebagai "ideologi Islam". Menurut kesadaran baru itu, negara yang didirikan harus berdasar pada ajaran Islam. Bahkan

kalau dimungkinkan, negara yang didirikan selayaknya secara formal disebut negara Islam.

Perdebatan berkepanjangan antara pemimpin Islam dengan para pemimpin nasionalis sekuler adalah wahana utama ekspresi ideologi Islam. Akan tetapi, massa Islam ternyata tidak menghayati permasalahan tersebut. Sebagian besar kaum Muslimin justru lebih cenderung menyukai negara dalam artian yang umum. Walaupun dalam sidang Konstituante pembela Islam masih mencoba sekali lagi untuk memunculkan hakekat negara seperti itu, namun dalam keseluruhannya kiprah gerakan Islam justru menunjukkan kemampuan untuk menerima kondisi obyektif itu, dan mencukupkan perjuangan yang mereka lakukan untuk menjadikan Islam sebagai salah satu faktor komplementer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kita akan menyadari, bahwa pendirian tentang Pancasila bukanlah sekedar untuk kepentingan politik temporal. Sikap ini merupakan manifestasi keyakinan atas ajaran Islam bagi suatu negara yang berdasar pada -Ketuhanan Yang Maha Esa-. Dengan dasar ini, Pancasila dalam konteks keindonesiaan memberikan kebebasan kepada masyarakat yang majemuk untuk memeluk dan melaksanakan aktivitas religiusitas sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Kebebasan ini bukan sekedar diterima begitu saja tanpa *Follow Up*, akan tetapi

